

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Pandeglang sebesar 1,70 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,24. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,49 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,20 %; kelompok kesehatan sebesar 3,60 %; kelompok transportasi sebesar 0,72 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 %; kelompok pendidikan sebesar 1,51 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,79 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,19. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Pandeglang bulan Juni 2024 masing-masing sebesar 0,30 % dan 0,93 %.

Pada Agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Pandeglang sebesar 1,72 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,91. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,94 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,08 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,87 %; kelompok kesehatan sebesar 3,77 %; kelompok transportasi sebesar 1,23 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,49 %; kelompok pendidikan sebesar 1,44 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,89 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,54. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Pandeglang bulan Agustus 2024 masing-masing sebesar 0,08 % dan 0,86 %.

Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Pandeglang sebesar 1,32 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,52. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,98 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,40 %; kelompok kesehatan sebesar 3,99 %; kelompok transportasi sebesar 1,05 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 %; kelompok pendidikan sebesar 1,44 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,86 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,00. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Pandeglang bulan September 2024 masing-masing sebesar 0,37 % dan 0,48 %.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Moment Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun 2024 pada tanggal 17 Agustus 2024, adalah suatu moment yang secara massif masyarakat melaksanakan berbagai macam kegiatan baik pra maupun pasca, sebagai bentuk apresiasi dan tasyakuran atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengakibatkan naiknya permintaan barang-barang. Namun hasil pantauan tidak terjadi kenaikan harga dan

kekurangan ketersediaan.

- Dan moment Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW secara histori di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara besar-besaran. Komoditas yang sering mengalami kenaikan harga pada moment tersebut adalah daging kerbau/sapi cabe merah, daging ayam, telur ayam ras dan bawang merah.
- Harga beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat yang tidak diatur oleh pemerintah, mekanisme pasar menjadi faktor pembentukan harga, hal ini perlu diwaspadai, baik di sisi permintaan maupun penawaran untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Keterjangkauan Harga**

- Melakukan pemantauan secara harian harga barang kebutuhan pokok dan penting dan melaporkan melalui portal <https://wasinflasi.kemendagri.go.id>
- Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Divre Lebak Pandeglang, pada setiap hari **Selasa** dan **Minggu**.
- Melakukan Kegiatan sidak ketersediaan bahan pokok di tingkat agen dan distributor, untuk memastikan ketersediaan barang serta agar distributor dan agen tidak menahan barang.
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Toko-toko Modern di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan Kegiatan Pasar Murah.

◦ **Ketersediaan Pasokan**

- Melaksanakan monitoring Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas.
- Mengintensifkan lahan-lahan pertanian potensial, untuk meningkatkan produksi beras agar kecukupan kebutuhan beras dapat terpenuhi
- Memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong/tidur sebagai sarana menanam tanaman cepat panen.
- Melakukan sidak ke tingkat Agen dan Distributor agar tidak menahan barang.

◦ **Kelancaran Distribusi**

- Secara umum distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah tidak mengalami hambatan.

◦ **Komunikasi Efektif**

Dalam membangun komunikasi antar stake holder dilakukan melalui :

1. Konsolidasi antar anggota TPID dan Stake Holder lainnya untuk mendapatkan data dan informasi langkah pengendalian inflasi.
2. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mendapat data pergerakan harga barang-barang yang dijadikan sebagai sample perhitungan angka inflasi sebagai bahan rumusan kebijakan.
3. Mengikuti secara rutin rakornas mingguan pengendalian inflasi, untuk mendapatkan informasi tentang kondisi terkini serta perkembangan kebijakan pengendalian inflasi secara nasional, sebagai referensi rumusan kebijakan di daerah.

Mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah, untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi kebijakan pusat tentang pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pantauan, ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, baik di tingkat pedagang, agen maupun distributor masih mencukupi, namun perlu diwaspadai terjadinya peningkatan permintaan pada moment2 tertentu, sehingga perlu Kerjasama antar daerah.

Belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus bergerak dalam bidang usaha pangan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Menjadwalkan kembali Kegiatan Operasi Pasar, untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga secara tidak wajar